



Ribuan E-KTP di DIY Dibakar

JOGJA—Ribuan e-KTP invalid di DIY akan dibakar pekan ini untuk menghindari penyalahgunaan. Dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) masing-masing daerah masih mendata e-KTP yang akan dimusnahkan.

*Rahmat Jiwandono, Fahmi Ahmad Burhan, & Herlambang Jati Kusumo
redaksi@harianjogja.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan menempuh prosedur pemusnahan itu dengan membakar 7.000 keping e-KTP invalid pada Jumat (21/12). Kepala Disdukcapil Kota Jogja, Sisruwadi mengatakan jumlah tersebut adalah perkiraan dan jawatannya masih mendata ulang e-KTP invalid di tiap kecamatan.

"Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, KTP elektronik yang tidak valid harus segera dimusnahkan

agar tidak disalahgunakan," ujar dia, Senin (17/12)

Beberapa daerah di Indonesia sudah membakar e-KTP invalid. Disdukcapil Kota Jogja baru akan membakarnya Jumat pekan ini.

Penyebab banyaknya e-KTP yang tidak valid adalah pemilik e-KTP yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, atau datanya tidak sesuai.

► Halaman 10

- Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia sudah membakar e-KTP invalid.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi merekomendasikan KPU menerapkan verifikasi elektronik terhadap calon pemilih Pemilu 2019.

Ribuan E-KTP...

Adapun Disdukcapil Sleman sudah mendata e-KTP invalid dari Agustus, hasilnya sudah ada 1.903 e-KTP invalid dan menggantungnya. Setelah adanya instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kamis (13/12), Disdukcapil menginventarisasi ulang data e-KTP invalid di tiap kecamatan.

"Sebelumnya yang invalid itu sudah kami gunting, tinggal nanti pembakarannya kami inventarisasi dulu. Jadi jumlah yang akan dibakar belum tahu, menunggu dari kecamatan. Kalau pembakarannya kan mudah, tapi kami amankan dulu dari aspek hukumnya, mulai dari berita acara, jumlah, dan waktunya kapan," ujar Kepala Disdukcapil Sleman Jazim Sumirat

Ia mengatakan e-KTP tersebut bersifat invalid karena beragam sebab. "Ada yang dari belum kawin menjadi kawin, pindah alamat, ataupun gagal cetak," kata Jazim.

Jazim mengatakan, sesuai instruksi Mendagri, Disdukcapil mendata e-KTP invalid hasil dari pencetakan massal dari 2011 sampai 2013.

Pi Kepala Disdukcapil Gunungkidul Anik Indarwati mengatakan jawatannya mulai mengumpulkan e-KTP yang invalid. "Jumlah pastinya belum, baru kami inventarisasi dan kami sisir di setiap kecamatan. Kemudian akan dipilah dan dihitung," kata Anik.

Penghitungan akan dilaksanakan secepat mungkin dan jika berjalan lancar pemusnahan akan dilakukan pada pekan ini. "Rencananya pada Jumat (21/12) akan kami musnahkan di halaman Kantor Pemkab," ujar dia.

Sekretaris Disdukcapil Gunungkidul, Virgilio Soriano mengatakan e-KTP invalid adalah e-KTP yang sudah tidak berfungsi lagi atau rusak cetak. Selama ini e-KTP invalid disimpan dalam gudang yang berada di kecamatan atau Kantor Disdukcapil. "Selama ini KTP yang sudah tidak berfungsi kami tandai dengan dipotong pada bagian pojok kanan. Semua tersimpan dan dapat dipastikan aman," ujar Virgilio.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kulonprogo, Agus Wiyono Raharjo belum bisa menyebutkan jumlah e-KTP invalid di kabupaten tersebut secara mendetail. "Mas, kami hitung. Baru tadi siang ada proses pengelompokan, mudah-mudahan besok siang sudah bisa diketahui jumlahnya," kata dia. Sementara, banyak pemerintah

daerah sudah membakar e-KTP invalid pada Senin kemarin.

Pemkot Solo memusnahkan 54.404 keping e-KTP rusak dan tidak berlaku di halaman Balai Kota Solo. "Ini kami musnahkan agar tidak disalahgunakan apalagi menjelang tahun politik," kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Solo Said Romadon.

Kepala Disdukcapil Solo Suwarta mengatakan pemusnahan puluhan ribu keping e-KTP meniadakan juti surat edaran Menteri Dalam Negeri No.470.13/1117/SJ. Dia menyatakan KTP-el yang dimusnahkan terdiri atas 22.894 keping e-KTP rusak dan 31.510 keping KTP lama atau tidak berlaku.

Pemusnahan juga dilakukan di Pacitan, Jawa Timur. Di kabupaten ini, 15.300 e-KTP invalid dibakar. Hal yang sama juga dilakukan di Ciamis, Jawa Barat. Sebanyak 18.462 keping e-KTP dibakar.

Di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, sekitar 20.000 keping e-KTP juga dibakar. "Kami bakar di halaman kantor agar tidak disalahgunakan menjelang pilpres dan pileg," ucap Kepala Disdukcapil Musi Banyuasin Asmarani.

Langkah serupa dilakukan di Tasimalaya (16.159 e-KTP rusak), Kota Tarakan, Kalimantan Utara (118.821 keping e-KTP). Di Tarakan, pemusnahan sudah dua kali dilakukan. Hal serupa juga dilakukan di Bone, Sulawesi Selatan hingga Gorontalo.

Kemendagri telah memerintahkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia segera membakar e-KTP invalid. Hal itu untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, muncul rentetan masalah seperti pembuangan ribuan e-KTP di Jakarta hingga Pariaman. Ada juga kasus jual-beli blangko e-KTP melalui toko online.

Sebenarnya, Kemendagri sudah memiliki prosedur memusnahkan e-KTP invalid, yakni menggantungnya. Namun, cara pemusnahan itu tak cukup meyakinkan untuk menepis semua persoalan menyangkut e-KTP.

Sebelumnya, tim capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding ada agenda tersembunyi dari rentetan tercecernya e-KTP. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, menilai terulangnya kasus e-KTP tercecer di sejumlah daerah merupakan bentuk kesengajaan. Ferry

curiga kejadian itu hal terencana kelompok tertentu untuk Pemilu 2019. "Kalau sekali alasan *human error* masuk akal, kalau terus terjadi berulang kali, ini kesengajaan. Ada agenda *setting* kelompok tertentu untuk Pemilu 2019," kata Ferry.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merekomendasikan KPU menerapkan verifikasi elektronik (e-verifikasi) terhadap calon pemilih Pemilu 2019. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan alat pembaca e-KTP.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwo, mengatakan implementasi konsep itu yaitu pemilih hanya perlu membawa e-KTP lalu diverifikasi dengan menggunakan sidik jarinya.

"Jadi kami memastikan bahwa orang yang datang adalah berhak, tidak ada jual beli surat undangan, tidak ada pemalsuan nama orang," ujar dia.

Dengan adanya e-verifikasi, dapat menghindari pemalsuan nama orang karena teridentifikasi keaslian identitas orang. Selain e-verifikasi, BPPT juga merekomendasikan tanda tangan digital untuk foto formulir C1 Plano kepada KPU.

"Di foto ditandatangani secara digital oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk dikirimkan ke KPU pusat sehingga jika terjadi permasalahan katakanlah sengketa pemilu, maka cukup foto tersebut yang digunakan sebagai alat bukti hukum, tidak lagi perlu membawa kotak surat dari TPS-TPS yang terpencil, jauh itu ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Michael mengemukakan BPPT sejak 2013 melaksanakan pemilihan kepala desa melalui e-voting di 982 pemilihan kepala desa di 18 kabupaten yang tersebar di 11 provinsi. Michael mengatakan tantangan mengenai menggunakan sistem pemilu elektronik antara lain sumber daya manusia tim KPS yang harus dilatih untuk menggunakan e-KTP reader.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT Eniya L. Dewi menyatakan belum ada jawaban tertulis dari KPU untuk memakai rekomendasi itu. Namun, BPPT terus mendorong penggunaan pemilu elektronik. (JRI/Devi/Asmara/Liputan6.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005